

GERAKAN

Sosial Di Indonesia



Penulis :

**Ita Rahmania Kusumawati, Mario, Enkin Asrawijaya,
Faidah Azuz, Musrayani Usman, Harifuddin,
Serepina Tiur Maida, Lusi Andriyani**
editor, **Muhammad Yasser Fedayyen**



GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA

**ENKIN ASRAWIJAYA
ITA RAHMANIA KUSUMAWATI
MARIO
FAIDAH AZUZ
MUSRAYANI USMAN
HARIFUDDIN
SEREPINA TIUR MAIDA
LUSI ANDRIYANI**



GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 118 + vi

Cetakan : Desember, 2022

ISBN : 978-623-8126-04-0 (EPUB)

Penulis : **Enkin Asrawijaya, Ita Rahmania Kusumawati,
Mario, Faidah Azuz, Musrayani Usman,
Harifuddin, Serepina Tiur Maida,
Lusi Andriyani.**

Editor : Muhammad Yasser Fedayyen

Sampul : latif azad mustofa

Layout : @.setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak oleh : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Perkembangan gerakan sosial di era modern saat ini sangatlah pesat, penyebabnya adalah krisis multidimensi yang mengganggu kehidupan masyarakat. Masuknya praktik neoliberal di beberapa negara berkembang telah menyebabkan kantong-kantong (baca: tempat) kemiskinan semakin banyak di dunia. Yang paling sering menjadi korban adalah masyarakat lokal dan komunitas adat yang biasanya bekerja mengandalkan alam, seperti petani.

Di Indonesia muncul berbagai macam gerakan sosial. Gerakan sosial ini lahir dari berbagai latar belakang dan permasalahan yang beragam, dari mulai permasalahan *livelihood*, ideologi, lingkungan, media sosial, feminisme, budaya, religi, kepemudaan, dan masih banyak lainnya. Buku ini akan menawarkan berbagai sudut pandang dari para penulisnya tentang temuan, gagasan, dan pengalamannya dalam mempelajari studi gerakan sosial.

Buku ini lebih fokus membahas bagaimana sejarah dan dinamika gerakan sosial di Indonesia. Tujuan dari diterbitkannya buku ini adalah untuk membantu akademisi dan masyarakat yang membutuhkan informasi seputar gerakan sosial agar dapat memahami studi ini dengan baik. Harapannya buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi tetapi akan muncul dialektika antar ilmuwan yang akan melahirkan *grand* teori dan kebaruan dibidang gerakan sosial yang fenomenanya terus berkembang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada Asosiasi KODELN, para penulis pada buku ini, Dr. Ari Setiawan, M.Pd, dan penerbit Nuta Media yang telah membantu terwujudnya buku ini. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, apa yang sudah kami tuliskan tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat kami harapkan.

Jakarta, 15 Agustus
2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	1
SEJARAH GERAKAN SOSIAL	1
<i>Ita Rahmania Kusumawati</i>	1
Edelman, Murray. 1977. Political Language. Words That Succeed and Policies That Fail. 2013. Elsevier. eBook ISBN: 9781483269801.	15
Ryan, Charlotte. Prime Time Activism: Media Strategies for Grassroots Organizing. 1991. South End Press.	16
BAB 2	18
TEORI - TEORI GERAKAN SOSIAL	18
<i>Mario</i>	18
BAB 3	37
GERAKAN SOSIAL BARU.....	37
<i>Enkin Asrawijaya</i>	37
BAB 4.....	50
GERAKAN SOSIAL PETANI DI INDONESIA	50
<i>Faidah Azuz</i>	50
BAB 5.....	68
GERAKAN EKOFEMINISME.....	68

<i>Musrayani Usman</i>	68
BAB 6.....	77
GERAKAN LINGKUNGAN.....	77
KONTRIBUSI TERHADAP MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN.....	77
<i>Harifuddin</i>	77
BAB 7	89
GERAKAN SOSIAL MELALUI KOMUNIKASI	89
PEMBELAJARAN KREATIF	89
<i>Serepina Tiur Maida</i>	89
BAB 8.....	101
GERAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN:	101
FORUM PEKERJA LOKALISASI SURABAYA (PLS) DAN KASUS PENUTUPAN DOLLY DI SURABAYA.....	101
<i>Lusi Andriyani</i>	101

Sinopsis

Gerakan sosial menjadi fenomena yang penting untuk dipelajari pada era sekarang ini. Dinamika kontemporernya melahirkan berbagai materi yang perlu didiskusikan. Tidak pernah ada habisnya, kajian-kajian sosial seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan fenomenanya selalu dinamis. Oleh karena itu, buku ini menjadi penting untuk dibaca karena banyak irisan pengetahuan dari berbagai kajian.

Buku bunga rampai yang berjudul 'Gerakan Sosial di Indonesia' ini ditulis oleh beberapa dosen dan peneliti dari beberapa kampus dan pusat riset di Indonesia. Pada bab pertama pembahasannya terkait sejarah dan perkembangan studi gerakan sosial, proses pembingkaihan, Jenis dan komponen gerakan sosial, tahapan dan tipologi gerakan sosial, Bab kedua, pembahasannya terkait teori-teori gerakan sosial dan perkembangannya. Bab ketiga, pembahasannya seputar karakteristik dan ciri-ciri gerakan sosial baru disertai dengan contohnya. Bab keempat, membahas tentang gerakan petani di Indonesia dan klasifikasinya. Bab kelima, membahas tentang kesadaran ekologi dalam bingkaihan gerakan ekofeminisme. Bab keenam, menyinggung persoalan konsep dan praktik pengelolaan dan manajemen bencana. Bab ketujuh, mengangkat studi komunikasi dalam gerakan sosial untuk pembelajaran yang efektif. Dan bab kedelapan, fokus pada gerakan sosial di perkotaan dengan studi kasusnya *ex-lokalisasi* di Surabaya.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak memahami kondisi bangsa dan berbagai persoalan yang ada. Pembaca juga akan diajak untuk dapat meyadarkan dirinya sendiri untuk memilih dikotomi persoalan yang dihadapi seputar fenomena sosial secara jeli sehingga mampu menyimpulkan suatu perkara secara komprehensif. Di sisi lain, buku ini akan menjadi tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

BAB 4

GERAKAN SOSIAL PETANI DI INDONESIA

Faidah Azuz

A. Pengertian Gerakan Sosial

Gerakan sosial menjadi salah satu alat untuk mencapai perubahan sosial. Stagnansi atau kebuntuan dalam kehidupan sosial harus didinamisasi agar perubahan sosial dapat tercapai. Semua bahasan sosiologis akan bermuara pada terjadinya perubahan sosial baik dalam skala wilayah, kelompok masyarakat, maupun dalam konteks ideologi. Sztompka (2007) secara gamblang menyebutkan bahwa yang hendak dicapai dalam perubahan sosial adalah cara berpikir kritis yang melibatkan agen berpengaruh dari berbagai kalangan. Keinginan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui gerakan sosial yang terkoordinasi dengan baik.

Gerakan sosial tidak memiliki definisi tunggal. Hal ini disebabkan banyaknya perspektif yang dapat diakomodasi untuk menelisik keragaman realitas sosial di masyarakat (Suharko, 2006; Berger dan Holger Nehring, 2017). Gerakan sosial bukan sesuatu yang baru, gerakan ini sudah ada sejak lama dan dapat ditelusur pada era kolonialisme di Indonesia. Gerakan pemberontakan petani di Banten dan gerakan nasionalisme merupakan salah satu contohnya. Gerakan sosial pasca kemerdekaan menurut Suharko (2006) terutama masa orde baru memasuki wajah yang lain seperti gerakan lingkungan, feminis, agraria, dan demokrasi. Ragam gerakan sosial ini berlanjut terus dan semakin menguat pada akhir tahun 90-an dengan gerakan anti globalisasi (gerakan sosial

anti globalisasi ala neoliberal) mewarnai praksis gerakan sosial di Indonesia yang tercermin dari gerakan pembaruan agraria, pertanian yang berkelanjutan, penguatan masyarakat adat, anti hutang luar negeri, dan lain sebagainya.

Berbagai definisi gerakan sosial dapat dipaparkan antara melalui hasil telaah Suharko (2006) dan Sukmana (2016). Giddens seperti diuraikan oleh Suharko (2006) memberi pengertian yang umum tentang gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sydney Tarrow yang menjadi rujukan Suharko (2006) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang, dan pemegang wewenang. Dua definisi ini mengantarkan pemahaman bahwa gerakan kolektif yang bersifat menentang dan dilakukan untuk mencapai tujuan kolektif merupakan karakter atau ciri dari gerakan sosial. Pengertian semacam ini sangat luas dan memiliki kemiripan dengan organisasi sosial lainnya. Oleh karena itu penting untuk menarik garis perbedaan antara gerakan sosial dengan organisasi sosial lainnya. Suharko (2006) memilah perbedaan tersebut dalam dua hal. Pertama, gerakan sosial dengan organisasi formal kadang memiliki batasan yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Sebaliknya sangat jarang sebuah organisasi formal berubah menjadi gerakan sosial. Suharko mengajukan contoh yang masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa sebelum berubah menjadi organisasi formal (partai politik), PRD dapat disebut sebagai sebuah gerakan sosial. ketika berubah menjadi partai politik, maka PRD telah menjadi organisasi formal dengan ciri birokratisnya.

Kedua, menurut Suharko (2006), meski tidak terlalu mudah gerakan sosial juga perlu dibedakan dari kelompok-kelompok kepentingan (interest group) yakni suatu asosiasi

yang dibentuk untuk memengaruhi para pembuat kebijakan dalam cara yang menguntungkan anggota-anggotanya. Misalnya organisasi perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan gender, yang seringkali terlibat dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan agak susah dibedakan; apakah ia merupakan kelompok kepentingan atautakah sebuah gerakan sosial? Untuk dapat melihat apakah sebuah gerakan benar-benar adalah gerakan sosial atau sekadar corong kepentingan politik sesaat maka Tarrow dalam Suharko (2006) mengajukan empat landasan dasar yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, dan memelihara politik perlawanan. Untuk memastikan politik perlawanan berjalan efektif para penggerak perlu melakukan konsolidasi untuk memastikan solidaritas tetap terjaga (Maryudi, dkk., 2015)

B. Gerakan Sosial Petani di Indonesia

Gerakan sosial memiliki banyak wajah salah satunya adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh petani. Tipologi gerakan sosial petani akan berbeda dengan gerakan sosial kelompok perempuan marginal perkotaan, pemerhati lingkungan, kelompok agama dan kepercayaan serta kelompok lainnya yang merasa terganggu dengan berbagai tekanan dan intimidasi. Namun jika ditarik benang merah salah satu pemicu masyarakat melakukan gerakan sosial disebabkan karena simpul dasar kehidupan mereka terganggu. Perempuan marginal perkotaan mungkin meletakkan kebebasan berusaha sebagai simpul dasarnya, pemerhati lingkungan mendudukkan persoalan sampah perkotaan sebagai hal krusial mereka, kelompok keagamaan tertentu merasakan adanya tekanan dan dominasi paham mainstream, dan bagi petani persoalan lahan dan permainan harga produksi pertanian merupakan nadi kehidupan mereka. Simpul dasar inilah yang memicu mengapa masyarakat melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial.

Bagi petani, lahan garapan adalah urat nadi mereka. Petani menjadi miskin dan tak berdaya lantaran kepemilikan lahan mereka dilemahkan baik oleh sistem (regulasi negara) maupun oleh pemilik modal lewat pencaplokan lahan mereka. Susanto (2015) mengurai lahan bagi petani sebagai tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga bermakna sosial dan keamanan. Secara ekonomi tanah merupakan tempat sumber makanan, tempat mencari penghidupan, sebagai tempat melakukan aktivitas produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Secara sosial tanah berarti eksistensi diri, sebagai tempat untuk menemukan dirinya secara utuh, bahkan tanah merupakan simbol status sosial di dalam masyarakat. Di dalam makna keamanan, tanah akan membawa rasa aman tertentu bagi petani jika sesuatu terjadi pada diri mereka, yang berarti tanah membawa efek psikologis bagi petani.

Penekanan pada gerakan petani dan hubungannya dengan tanah, maka dengan sendirinya akan memperlihatkan cara-cara pemaknaan petani terhadap tanah. Makna tanah bagi petani akan tergambar dalam nilai-nilai yang mereka anut atau percayai. Di dalam kasus gerakan petani yang ada pada era 1980an, memperlihatkan bahwa petani memberikan makna yang bersifat ideologis terhadap tanah. Petani mempertahankan tanah bukan hanya karena nilai komoditasnya, tetapi merupakan akumulasi dari nilai-nilai ideologis yang membentuknya. Petani tanpa tanah serasa bukan menjadi petani lagi, tanah merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya (nilai sakral), tanah secara utuh merupakan gambaran eksistensi dari si petani itu sendiri (Bahri dalam Susanto, 2015).

Dalam perbincangan tentang petani terdapat dua istilah penting yang memiliki karakter berbeda yakni *farmer* dan *peasant*. Bahasan tentang gerakan sosial di mana lahan menjadi titik awal pemicu lahirnya kesadaran untuk memperjuangkan nasib maka posisi petani sebagai *peasant* menemukan relevansinya. Namun jika pembicaraan berkaitan

dengan posisi tawar petani dalam hal harga dan jaringan pemasaran maka petani sebagai *farmer* akan lebih tepat digunakan (Dewi, 2007; Forrest & Donaldson, 2010; Susanto, 2015). Secara terperinci Dewi (2007) menguraikan perbedaan antara *farmer* dan *peasant* sebagai berikut; *Farmer* adalah petani yang menguasai faktor produksi secara memadai, tanah pertanian yang relatif luas, mampu mengakumulasi surplus usaha taninya. Mereka memiliki modal usaha dan jaringan sosial yang kuat dengan tokoh-tokoh dari kelas sosial atas seperti elite politik dan elite ekonomi. *Farmer* ini juga digolongkan sebagai kelompok petani lapisan atas yang mengadopsi budaya kelas dominan dalam struktur negara.

Sementara *peasant* dalam uraian Dewi (2007) adalah petani yang menguasai sedikit sumber daya alam. Mereka sering disebut petani gurem, dan termasuk buruh tani yang tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidupnya pada kerja bagi hasil. *Peasant* ini memiliki pandangan dan gaya hidup yang berbeda dengan *farmer*. Mereka ini disebut mengembangkan budaya kecil, atau budaya marginal yang berbeda dengan budaya yang dikembangkan oleh lapisan penguasa. Dalam perkembangan selanjutnya kita mengenal petani berdasar atau petani pengusaha. Mereka inilah yang dimaksud dengan *farmer*. Petani kecil yang dalam beberapa terminologi politik dikenal sebagai wong cilik adalah *peasant*. Karakteristik dan bagaimana strategi *peasant* bertahan hidup dapat dilihat dalam tulisan James Scott; *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Senjatanya Orang-Orang Kalah.

Lebih lanjut Scott (2000) menjelaskan tentang *peasant* dalam kajiannya di Sedaka Malaysia bahwa petani lemah itu melakukan perlawanan sehari-hari secara terselubung, karena mereka tidak memiliki wadah organisasi politik formal, berbeda dengan kelas menengah dan kaum cendekiawan yang memiliki organisasi politik dan pemimpin formal dalam memperjuangkan kepentingannya. Masyarakat petani yang

lemah ini melakukan bentuk pertarungan jangka panjang, antara petani dan pihak yang mencoba menyerobot pekerjaan, makanan, sewa, dan bunga dari mereka. Senjata yang dipergunakan oleh masyarakat petani lemah ini, antara lain memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, penyabotan, dan sebagainya. Mereka hampir tidak memerlukan koordinasi atau perencanaan, menggunakan pemahaman implisit serta jaringan informal, sering mengambil bentuk mengurus sendiri, dan mereka secara khas menghindari konfrontasi simbolis yang langsung dengan penguasa.

Cara-cara seperti ini dalam jangka panjang justru terbukti paling efektif. Teknik-teknik *lowprofile* ini sangat cocok untuk struktur sosial kelas petani, tanpa organisasi formal dan siap untuk melakukan kampanye defensif menghabiskan tenaga lawan dengan gaya gerilya. Tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan secara perorangan, diperkuat dengan budaya perlawanan rakyat dan diperbanyak ribuan kali, pada akhirnya akan meneguhkan 'batu karang' ekonomi dan politik mereka. Sebagian besar dengan cara inilah kelas petani menyatakan kehadiran politisnya. Dan setiap saat, kapal besar yang bernama negara dapat saja kandas pada batu karang perlawanan rakyat petani ini. Cara perlawanan ini dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial petani.

Kebijakan pembangunan pertanian yang mengarah pada modernisasi sistem pertanian, akan mendapat reaksi negatif dari masyarakat petani (*peasant*) karena dianggap mengancam keamanan subsistensi mereka. Modernisasi pertanian terjadi seiring dengan proses penetrasi kapitalisme pada masyarakat petani akan ditentang keras karena mengancam kepentingan ekonomi mereka. Masyarakat petani cenderung untuk terus melekat pada cara hidupnya yang tradisional. Setiap hal yang baru menurut mereka akan membahayakan keseimbangan yang ada. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat petani juga akan mendukung usaha mempertahankan hubungan-hubungan sosial yang tradisional,

dan pengeluaran dana-dana seremonial yang diperlukan untuk menopang hubungan-hubungan itu. Selama hubungan-hubungan itu dapat dipertahankan, masyarakat petani dapat menolak penetrasi lebih lanjut oleh tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan dari luar. Sementara mereka memaksa anggota anggotanya yang lebih beruntung untuk membagi sebagian dari kerja dan barang-barang mereka dengan tetangga-tetangga mereka yang kurang beruntung (Wolf dalam Dewi 2007).

Bagian ini selanjutnya akan mengelaborasi gerakan sosial petani pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Gerakan sosial petani masa kolonial diwakili oleh gerakan petani di Madura dan pemberontakan petani di Banten. Sementara gerakan sosial petani masa pasca kemerdekaan adalah eksplorasi dari protes petani di beberapa tempat terhadap perebutan lahan pertanian mereka oleh negara dan swasta.

1. Gerakan Sosial Petani Masa Kolonial

Kajian historis yang dilakukan oleh Muflaha, dkk (2021) menunjukkan bahwa gerakan sosial yang berlangsung di kalangan petani cukup luas mulai dari aspek agraria hingga monopoli dagang yang sangat politis. Kajian ini menguraikan kedudukan penting Madura sebagai sentra produksi garam nusantara yang mengantarkan Madura pada posisi tawar perdagangan komoditas garam yang diperhitungkan. Oleh sebab itu, kolonial Belanda kemudian melirik Madura dan menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan garam Nusantara. Sistem monopoli garam dalam perdagangan garam menimbulkan dampak bagi petani garam di Madura. Petani garam Madura lantas melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, meskipun resistensi mereka dapat dipadamkan. Latar belakang perlawanan petani atau gerakan sosial petani garam di Madura dilihat dalam dua aspek yakni pajak yang tinggi terhadap hasil bumi dan monopoli perdagangan garam oleh kolonial (VOC). Pemicu lainnya yang memacu lahirnya tindakan kolektif sebagai landasan utama gerakan sosial petani adalah

selain menjadi identitas kultural, garam bagi penduduk Madura adalah lambang kemakmuran. Madura seringkali disebut pulau garam. Garam yang dihasilkan oleh petani setempat memiliki kualitas unggul dibandingkan wilayah lain di Nusantara. Belanda telah melakukan praktik monopoli garam di Madura sejak 1882. Sebagai sebuah komoditas, garam telah diperdagangkan sebelum kedatangan VOC. Pada masa pemerintah lokal Madura tambak garam telah digarap dengan menggunakan sistem sewa. Hasil dari perdagangan garam tersebut membuka sirkulasi uang yang beredar di Madura. Oleh sebab itu, VOC melihat perdagangan garam sebagai niaga yang menjanjikan. VOC lantas menerapkan sistem lisensi pajak, yakni menarik keuntungan dari perdagangan garam. Garam dalam pandangan VOC sangat menggiurkan bahkan keuntungannya melampaui hasil penjualan opium kala itu (Wahid dalam Mufliha, 2021).

Pendapatan yang menggiurkan ini mendorong VOC ingin menguasai semua alur kegiatan dan perdagangan garam, dan kemudian VOC menerapkan sistem monopoli. Petani dan masyarakat Madura tidak menyetujui monopoli perdagangan garam. Beberapa aksi dilakukan oleh petani garam untuk memprotes monopoli garam di Madura (de Jonge dalam Mufliha, 2021). Sistem monopoli dilakukan dengan cara memborong perdagangan garam dan mengawasi setiap kegiatan produksinya. Masyarakat yang memproduksi garam diklasifikasikan sebagai pemilik lahan dan petani garam. Banyak pemilik lahan tidak mengelola lahan miliknya. Mereka bekerja sama dengan petani garam yang notabene buruh tani. Di Sumenep dan Pamekasan terdapat sistem “maro” (separuh) dalam ikatan kerja sama pengelolaan lahan. Dalam sistem *maro* hasil diproduksi dibagi dua antara pemilik dan pekerja. Sistem *maro* dalam pertanian garam tersebut dipraktikkan oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli produksi garam di Madura (Wisnu dalam Mufliha, 2021). Monopoli melalui sistem *maro* menimbulkan reaksi dari pemilik dan petani garam terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perasaan tidak puas

petani garam diungkapkan dengan menghasilkan produk garam yang tidak berkualitas. Selain itu, petani juga melakukan aksi *ngoret* di ladang garam. Aksi *ngoret* adalah tindakan mengambil sisa-sisa hasil panen garam di ladang yang mana berubah bentuk menjadi pencurian tersamar. Hal inilah yang menjadi salah satu bentuk tindakan kolektif dalam gerakan sosial petani melawan monopoli garam VOC. Aksi *ngoret* umumnya dilakukan oleh para perempuan setempat yang berusia 25 hingga 40 tahun. Pelaku *ngoret* menggunakan peralatan sapu lidi kecil, serok, timba atau *engkrak*, dan karung.

Kajian lain tentang gerakan sosial petani dapat dilihat dalam kajian pemberontakan petani Banten tahun 1888. Secara gamblang Wahid (2010) mengatakan bahwa pemberontakan petani Banten merupakan sebuah gerakan sosial dan budaya yang banyak menarik perhatian berbagai kalangan akademisi. Akademisi budaya dan agama melihat bahwa aksi pemberontakan petani Banten adalah gerakan kultural keagamaan karena tokoh penggeraknya berasal dari kalangan kiyai (Hamidah, 2010). Pandangan lain datang dari para pemerhati sosiologi seperti Suharko (2006) dan Wahid (2010) yang meletakkan pemberontakan petani Banten sebagai bentuk gerakan sosial yang berada di ranah sosiologi.

Pemberontakan Petani Banten meletus pada hari Senin, tanggal 9 Juli 1888 di wilayah Cilegon Provinsi Banten. Gerakan sosial ini dilakukan oleh kaum petani Banten dengan kekuatan nilai-nilai tradisional (Agama Islam). Mereka memberontak terhadap kolonialisme Belanda untuk merebut kembali hak-hak mereka dalam bercocok tanam padi sebagai bahan pokok untuk bertahan hidup. Pemberontakan Petani Banten berlangsung dengan perencanaan yang melintasi batas waktu dan ruang dan dipersiapkan secara matang oleh tokoh agama melalui mobilisasi petani dan penanaman nilai keagamaan. Kekerasan terjadi hampir sepanjang hari Senin tersebut. Hampir semua pejabat asing menjadi korban kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini kekuasaan asing benar-

benar berhadapan dengan kekuatan pemberontak pihak petani. Dikatakan oleh Hamidah (2010) bahwa Gerakan Petani Banten ini tidak termasuk pemberontakan yang besar jika dibanding dengan pemberontakan di negara-negara lain. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan ini merupakan gejala khas dari perubahan sosial dan perkembangan yang menyertainya yakni pergolakan yang sosial, yang begitu menonjol di Jawa pada abad XIX dan cukup merepotkan kolonial.

Gerakan Petani Banten tidak saja diikuti oleh para petani *an sich*. Melainkan mereka yang berasal dari golongan penduduk pedesaan yang kaya dan terkemuka, para pemuka agama. Hanya dalam arti yang terbatas saja, pemberontakan yang terjadi dalam abad XIX di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemberontakan petani yang murni dan sederhana. Arti penting dari jenis pemberontakan ini bukanlah terutama karena dampaknya terhadap perkembangan politik, melainkan terletak dalam fakta bahwa kejadiannya yang endemik selama abad XIX dapat dipandang sebagai suatu manifestasi dari pergolakan agraris yang merupakan denyut arus bawah dari alur utama perkembangan politik pada periode "*Pax Neerlandica*". Sampai saat kejatuhan rezim Belanda, tampaknya ada rasa tidak puas yang meluas, yang senantiasa membara di bawah permukaan (Hamidah, 2010).

2. Gerakan Sosial Petani Pasca Kemerdekaan

Pada bagian terdahulu telah diungkapkan dua peristiwa gerakan sosial petani di masa kolonial. Sebenarnya masih banyak lagi kajian tentang gerakan sosial petani di Nusantara masa kolonial, namun kiranya dua peristiwa yakni gerakan sosial petani garam di Madura dan pemberontakan petani Banten dapat mewakili bahasan ini. Corak gerakan sosial yang dilakukan oleh petani Garam Madura dan petani Banten memiliki akar yang sama yakni menolak dominasi satu pihak baik dalam konteks monopoli dagang maupun perebutan tanah. Tentang perebutan tanah di ranah lain menjadi bahasan

khusus dalam kajian yang bertajuk keagrariaan. Apa yang terjadi dengan gerakan sosial pasca kemerdekaan akan menjadi titik fokus selanjutnya.

Isu yang memicu lahirnya gerakan sosial petani pasca kemerdekaan umumnya berkisar pada persoalan agraria atau perampasan tanah milik masyarakat terutama petani baik yang dilakukan oleh korporasi maupun negara. Isu agraria mencuat terutama pada tahun 80 an dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dalam struktur ekonomi akibat munculnya globalisasi. Atas nama pembangunan yang mengikuti pemikiran globalisasi pertumbuhan ekonomi harus dipacu. Pada saat yang bersamaan banyak hak masyarakat petani yang dilanggar.

Salah satu bentuk gerakan sosial yang diketengahkan dalam bahasan ini adalah gerakan Darwas yang terjadi di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Gerakan masyarakat petani ini beranggotakan 47 kepala keluarga (KK) yang berjuang menuntut hak dan rasa keadilan terhadap kesewenangan penguasa terhadap kaum lemah. Masyarakat Ketaping berupaya mendapatkan hak mereka dengan membentuk suatu kelompok dan melakukan gerakan dengan aksi demonstrasi di berbagai tempat, seperti ke Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Padang, Kantor DPRD Sumbar dan Kantor Gubernur. Dalam mewujudkan perjuangan tersebut gerakan ini juga berupaya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak atau lembaga, seperti mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan adat. Sebagian besar penduduknya adalah pendatang, terutama dari Pesisir Selatan dan penduduk yang tergusur dari kota Padang (keturunan Nias). Umumnya penduduk kurang berpendidikan dengan mata pencaharian sehari-hari adalah bertani, berladang, tukang, serta petani penggarap (Yuhartil, 2018).

Pada tahun 1970 sejumlah masyarakat berdatangan ke Nagari Ketaping dengan tujuan untuk bisa tinggal di sana guna menyambung hidup mereka. Ketika itu masyarakat mendapati

daerah tersebut rimba belantara tidak berpenghuni. Masyarakat sama sekali tahu bila tanah tersebut merupakan bekas tanah *Erpacht Verponding* 184 atau bekas perkebunan milik pemerintahan kolonial Belanda. Mereka hanya tahu bahwa tanah itu adalah tanah kosong, semak belukar, tanah hutan dan tidak bertuan. Setelah mendapatkan izin lisan dari pemerintah dan pengetua adat setempat tanah tersebut mereka membuka dan menggarapnya menjadi lahan sawah dan ladang yang produktif.

Pada tahun 1983 sebagian besar tanah negara tersebut telah didistribusikan kepada petani penggarap dalam program redistribusi berdasarkan SK Gubernur No.592.1/246/03-HM/1987 yang isinya menjelaskan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada petani-petani penggarap. Namun, di kemudian hari SK Gubernur tersebut banyak menimbulkan masalah di lapangan. Banyak di antara mereka yang menerima pembagian tanah negara tersebut bukanlah orang-orang yang benar-benar sejak awal membuka dan menggarap, tetapi sejumlah oknum aparat Pemda dan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Padang Pariaman. Merasa tidak puas terhadap sikap dan perlakuan dari pihak BPN tersebut akhirnya warga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok 47 di bawah pimpinan Darwas memperjuangkan haknya serta menuntut keadilan ke DPRD dan Gubernur. Aksi-aksi yang dilakukan berupa dialog mempertanyakan soal status tanah milik mereka serta melakukan demonstrasi- demonstrasi. Bersamaan dengan keinginan warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah berupa sertifikat, pemerintah daerah memutuskan daerah Ketaping menjadi lokasi bandara internasional. Sementara pemerintah hanya memberikan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang memiliki sertifikat. Permasalahan lain adalah terjadinya manipulasi tentang luas tanah, yakni luas tanah yang dikeluarkan dalam sertifikat jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas tanah yang mereka miliki atau yang digarap warga masyarakat selama ini. Hal demikian terjadi karena sebagian dari tanah yang

dimaksud telah dikeluarkan sertifikatnya atas nama hak milik orang lain (Yuhasnii 2018).

Apa yang dilakukan oleh Darwas yang menjadi tokoh penggerak masyarakat Ketaping adalah jelas merupakan suatu gerakan sosial petani karena memenuhi unsur lahirnya gerakan sosial. Meminjam batasan gerakan sosial oleh Tarow, dapat dilihat bahwa tekah terpenuhi unsur gerakan sosial yakni adanya tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif, dan memelihara politik perlawanan. Masyarakat Kelompok 47 di bawah pimpinan Darwas terus menerus memelihara politik perlawanan mereka terhadap pemerintah atas upaya pengambilalihan tanah mereka oleh negara atas nama pembangunan yang dalam hal ini perluasan bandara.

Kajian lain dilakukan oleh Susanto (2015) terhadap upaya petani Banjarnyari mempertahankan lahan pertanian mereka. Desa Banjarnyari secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di wilayah Kecamatan Banjarsari. Sebagian besar masyarakat Desa Banjarnyari bekerja di sektor pertanian. Hal ini tercermin di dalam data monografi desa. Penduduk Desa Banjarnyari berjumlah 4283 orang atau 1420 KK (Kepala Keluarga) dan sebanyak 1139 KK bekerja di sektor pertanian. Banyaknya warga masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, tidak serta merta membuat adanya pemerataan dalam kepemilikan tanah.

Pemicu utama petani di Banjarsari melakukan gerakan sosial adalah karena mereka keyakinan bahwa tanah perkebunan hutan yang ada di daerah Banjarnyari merupakan tanah warisan nenek moyang, ditambah lagi dengan kemiskinan yang dialami warga akibat tidak memiliki lahan pertanian, padahal mata pencaharian utama yang menjadi ciri khas warga daerah pegunungan dan diwariskan secara turun-temurun adalah pertanian, maka gerakan-gerakan rakyat untuk memperjuangkan tanah dengan merebutnya kembali menguat pada masyarakat Desa Banjarnyari Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis, terutama setelah jatuhnya penguasa

orde baru Soeharto. Di samping itu, pemicu sengketa lahan yang menjadi kekuatan penggerak warga untuk berjuang meraih kembali lahan pertanian mereka adalah karena status tanah setelah perkebunan belum jelas. Semangat warga yang semakin besar dalam berjuang merebut lahan mereka pada perkembangannya membuat mereka bersepakat untuk mendirikan Panitia Pembebasan Lahan (PPL). Selanjutnya, Pada tanggal 26 April 1999, terbentuklah Panitia Pembebasan Lahan (PPL) bersama Eni CS di Cigayam dengan di dampingi seorang pengacara. Organisasi PPL ini diketuai oleh Pak Oman. Namun dalam perkembangannya, perjuangan yang dilakukan PPL dianggap gagal, karena warga masih belum mendapat hak penggunaan lahan.

Perkembangan selanjutnya, warga bertemu dengan Agustiana yang pada saat itu bergabung dengan aktivis mahasiswa Ciamis, Tasik, dan Garut dalam YAPEMAS (Yayasan Pengembangan Masyarakat). Di dalam pertemuan tersebut Agustiana mengajak warga Banjaranyar untuk melakukan perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak atas tanah dengan membentuk Serikat Petani Pasundan (SPP). Pada masa PPL, perjuangan yang dilakukan warga hanya melalui gugatan hukum. Namun perjuangan tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Menurut Agustiana, pada tahun 1999 di daerah Priayangan Timur begitu banyak kasus persengketaan tanah, baik itu di atas tanah perkebunan ataupun di atas tanah kehutanan (Perhutani). Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998, warga yang semula ditekan oleh Pemerintah Orde Baru mulai berani menuntut hak mereka atas tanah. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya gerakan mahasiswa di kawasan Ciamis, Tasik dan Garut. Ia berpendapat bahwa, gerakan mahasiswa yang membesar pada tahun 1998 dapat bertahan, hanya apabila bergabung dengan gerakan rakyat, seperti gerakan petani dalam menuntut tanah.

Menurut Bapak Oman, Agustiana mengajak warga Banjaranyar untuk bergabung membentuk Serikat Petani

Pasundan (SPP) dan membubarkan Panitia Pembebasan Tanah. Panitia Pembebasan Tanah dianggap tidak akan dapat bertahan lama, karena hanya bertujuan untuk mendapatkan tanah dan selesai pada kasus Banjarnyar. Sedangkan Serikat Petani Pasundan (SPP) tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan hak atas tanah tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tanah tersebut. Selain daripada itu, bergabungnya warga Banjaranyar dapat menjadi penyokong dalam membantu penyelesaian kasus sengketa tanah di desa-desa lain di wilayah Ciamis, Tasik, dan Garut. Untuk menguatkan perjuangan dibentuklah OTL (Organisasi Tani Lokal). Tahapan gerakan yang di rumuskan oleh OTL adalah dengan menyatukan warga. Kemudian melakukan lobi dan memperkuat jaringan dengan berbagai elemen tani lalu merebut kekuasaan lokal. Sebab, kepala desa dianggap sangat menentukan nasib ke depan. Berhasil dan tidaknya perjuangan tergantung pada keberpihakan kepala desa terhadap perjuangan tersebut. Di desa Banjaranyar ini, sekarang mereka sudah menguasai struktur pemerintahan Lokal dengan dijadikannya salah satu anggota SPP atau pendiri PPL menjadi kepala desa (Susanto, 2015).

Perjuangan panjang membuahkan hasil pada tahun 2000 atas lahan eks-perkebunan AGRIS NV mulai membuahkan hasil. Lahan perkebunan seluas 708,35 hektar didistribusikan kepada warga desa sekitar perkebunan, yaitu Desa Kalijaya, Desa Pasawahan, Desa Cigayam, dan Desa Banjaranyar. Di Desa Banjaranyar terdapat 195 orang yang kemudian mendapatkan tanah. Setelah beberapa lamanya dimusyawarahkan, pada tahun 2008 sebanyak 70 H lahan dari perkebunan baru bisa didistribusi kepada warga. Bahkan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama warga dengan pembagian 90 bata. Per KK). Dari keseluruhan luas tanah 348 H, sedangkan 60 H milik perkebunan, maka sisa lahan yang masih terus diperjuangkan warga Desa Banjaranyar hingga saat ini sebesar 209 H. Redistribusi tanah yang ada di Desa

Banjaranyar didasarkan pada tiga hal, yaitu ramah lingkungan, berkesinambungan, dan berkeadilan.

C. Penutup

Kajian tentang gerakan sosial petani memberikan pengetahuan bahwa terminologi petani perlu dibaca dalam dua dimensi, *farmer* dan *peasant*. Gerakan sosial umumnya berfokus pada petani sebagai *peasant* karena karakteristik mereka yang rentan terhadap tekanan berbagai pihak baik oleh pihak pengusaha maupun negara. Berdasarkan situasi *peasant* tersebut maka pemicu utama perlawanan petani terhadap kemapanan adalah persoalan lahan mereka yang terampas oleh kekuatan besar. Berbagai corak perlawanan dilakukan petani secara berskala masif dengan memelihara solidaritas dan memastikan perlawanan yang dilakukan berjalan terus menerus. Untuk memenuhi terpeliharanya solidaritas dan memastikan perlawanan berjalan terus menerus maka diperlukan tindakan kolektif yang diwadahi dalam sebuah lembaga milik masyarakat itu sendiri dan bukan oleh kelompok kepentingan yang bernuansa politis praktis. Akhirnya gerakan sosial petani akan bermuara pada perubahan sosial yang memberikan atmosfir kegiatan bertani yang melegakan petani itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Berger, Stefan dan Holger Nehring (eds). (2017). *The History of Social Movements in Global Perspective; A Survai*. Palgrave.
- Dewi, O. (2007). Resistensi Petani: Suatu Tinjauan Teoritis. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 12(2).
- Forrest Zhang, Q., & Donaldson, J. A. (2010). From Peasants to Farmers: Peasant Differentiation, Labor Regimes, and Land-Rights Institutions in China's Agrarian Transition. *Politics & Society*, 38(4), 458–489.

- Hamidah, H. (2010). Gerakan Petani Banten: Studi Tentang Konfigurasi Sufisme Awal Abad Xix. *Ulumuna*, 14(2), 323-240.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., & Siswoko, B. D. (2016). The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 67, 70-75.
- Mufliha, D. I., Khasanah, A. N., Siddiqy, H. A., Lutfi, A., & Susanto, D. (2021). Perlawanan Petani Garam Madura Terhadap Monopoli Dagang Kolonial Belanda: Tinjauan Historis. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(2), 161-170.
- Scott, James. (2000). *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suharko, S. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-34.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Susanto, N. H. (2015). Gerakan Sosial Petani Desa Banjaranyar dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian. *Jurnal Penelitian*, 12(2), 295-314.
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada.
- Wahid, M. (2019). Membaca Kembali Pemberontakan Petani Banten 1888 dalam Strukturasi Giddens. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 65-76.
- Yuhansil, Y. (2018). Gerakan Sosial Masyarakat Petani di Nagari Ketaping. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 121-132.

Biodata:

Faidah Azuz adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar dengan kepakaran Sosiologi Perdesaan dan Sosiologi Pertanian. Ia menyelesaikan Doktor Sosiologi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beberapa konferensi internasional telah diikuti selaku pembicara dengan mengusung topik tentang budaya lokal yang basisnya di perdesaan. Faidah pada bulan Juli 2021 menyajikan paper berjudul *Inter-village Reconciliation among Muslim Kampongs* secara online di Michigan University. Faidah ikut menulis dalam empat *bookchapter* pada tahun 2021-2022, yakni buku *Lingkungan Pertanian, Problem Sosial Budaya di Indonesia, Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Pertanian Terpadu* yang kesemuanya diterbitkan oleh Nutamedia Yogyakarta.

Gerakan sosial menjadi fenomena yang penting untuk dipelajari pada era sekarang ini. Dinamika kontemporeranya melahirkan berbagai materi yang perlu didiskusikan. Tidak pernah ada habisnya, kajian-kajian sosial seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan fenomenanya selalu dinamis. Oleh karena itu, buku ini menjadi penting untuk dibaca karena banyak irisan pengetahuan dari berbagai kajian.

Buku bunga rampai yang berjudul 'Gerakan Sosial di Indonesia' ini ditulis oleh beberapa dosen dan peneliti dari beberapa kampus dan pusat riset di Indonesia. Pada bab pertama pembahasannya terkait sejarah dan perkembangan studi gerakan sosial, proses pembingkaihan, Jenis dan komponen gerakan sosial, tahapan dan tipologi gerakan sosial, Bab kedua, pembahasannya terkait teori-teori gerakan sosial dan perkembangannya. Bab ketiga, pembahasannya seputar karakteristik dan ciri-ciri gerakan sosial baru disertai dengan contohnya. Bab keempat, membahas tentang gerakan petani di Indonesia dan klasifikasinya. Bab kelima, membahas tentang kesadaran ekologi dalam bingkaihan gerakan ekofeminisme. Bab keenam, menyinggung persoalan konsep dan praktik pengelolaan dan manajemen bencana. Bab ketujuh, mengangkat studi komunikasi dalam gerakan sosial untuk pembelajaran yang efektif. Dan bab kedelapan, fokus pada gerakan sosial di perkotaan dengan studi kasusnya *ex* lokalisasi di Surabaya.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak memahami kondisi bangsa dan berbagai persoalan yang ada. Pembaca juga akan diajak untuk dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk memilih dikotomi persoalan yang dihadapi seputar fenomena sosial secara jeli sehingga mampu menyimpulkan suatu perkara secara komprehensif. Di sisi lain, buku ini akan menjadi tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Harapannya akan semakin banyak orang yang memperhatikan gerakan sosial di Indonesia. Tidak hanya itu, diharapkan buku ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan, kepedulian kepada sesama, penegakan hak-hak hidup, dan kesadaran-kesadaran sosial lainnya. Buku ini bertujuan supaya dapat menjadi sumber pengetahuan oleh kalangan akademisi, politisi, budayawan, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum.



Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021

